

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR SHINTA DAYA  
TAHUN 2024**



**Jl. Yogya-Solo Km. 15 Bogem, Tamanmartani Kalasan,  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571  
TELEPON: (0274) 496036, 496074**



## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR Shinta Daya
Alamat	Jl. Yogya - Solo km. 15 Bogem Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Nomor Telepon	(0274) 496036

### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. BPR Shinta Daya pada tahun 2024 telah membawa perkembangan BPR menjadi lebih baik meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah tingkat persaingan yang tinggi dan era digitalisasi serta kondisi perekonomian yang kurang baik yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Shinta Daya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Shinta Daya dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Shinta Daya didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Shinta Daya.

BPR Shinta Daya telah beroperasi lebih dari 54 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi Bank Terbaik dan Terpercaya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat DIY dan Jateng.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Shinta Daya selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang tahun 2024 dan untuk di tahun-tahun mendatang, BPR Shinta Daya terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR Shinta Daya telah melaksanakan pelaksanaan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola, secara umum kelemahan



tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Suitbertus Fajar Nugraha</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	Tanggung Jawab Direktur Utama :	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin dan mengelola PT BPR Shinta Daya sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan serta Garis Besar Program yang telah disampaikan dan disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham.</li><li>2. Bertanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya dan kinerja Bank.</li><li>3. Bertanggung jawab atas perumusan kebijakan-kebijakan Bank.</li><li>4. Bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan rencana, pengawasan, pengendalian operasional Bank.</li><li>5. Melaksanakan tanggung jawab langsung dan pengendalian khusus yang meliputi pembinaan dan pengelolaan kredit, dana, peningkatan efisiensi dan optimalisasi sarana pendukung operasional dan mobilisasi dana, pengembangan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal, mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, serta meningkatkan citra positif Bank di masyarakat.</li><li>6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.</li></ol>	
	Rincian Tugas :	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memprakarsai penyusunan program kerja dan rencana anggaran yang akan ditetapkan menjadi target yang akan dicapai oleh perusahaan.</li><li>2. Mengevaluasi dan menganalisis perkembangan bank.</li><li>3. Mengendalikan dan menentukan langkah-langkah pengawasan operasional bank.</li><li>4. Memutus plafond kredit yang diusulkan oleh bagian terkait yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian.</li><li>5. Meninjau kembali, meneliti, menilai dan menyetujui atau menolak permohonan kredit yang telah diproses dan dinilai bawahan (Account Officer, staf kredit SME, Kasi Kredit SME, Analis Kredit, Kasi Marketing wilayah, Kasubag Kredit Kabag Kredit, Pemimpin Cabang, Kepala Divisi Bisnis.</li></ol>	
<b>2.</b>	<b>Nama</b>	<b>Johannes Bosco Herimahadi</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	Tanggung Jawab Direktur YMF Kepatuhan :	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Operasional dalam hal mengamankan semua Keputusan dan Kebijakan Direksi, baik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) atau melalui Surat Edaran (SE) lainnya serta Memo Direksi.</li><li>2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Operasional melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku.</li><li>3. Menjamin terlaksananya rencana kerja yang akan dicapai oleh masing-masing unit tugas dari tingkat Kepala Divisi sampai dengan pelaksana, melalui pengawasan dan evaluasi hierarkis yang dapat dikendalikan lewat jalur Struktur Organisasi.</li></ol>	



4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Rincian Tugas

1. Bersama- sama Direktur Utama dan Direktur Operasional mengambil langkah- langkah preventif bagi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kegiatan operasional perbankan.
2. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
3. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
4. Memantau identifikasi nasabah baru berikut transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.
5. Memantau dan memastikan hasil pemeriksaan dari Audit Intern Bank, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas dan lembaga lain telah ditindak lanjuti oleh bagian terkait berdasarkan prinsip kepatuhan.
7. Membuat laporan kerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama.

3.

Nama

**Laurentia Dyah Widia**

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tanggung Jawab Direktur Operasional :

1. Bersama- sama Direktur Utama dan Direktur Bisnis melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku.
2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku
3. Melaksanakan tanggung jawab langsung dan pengendalian khusus yang meliputi peningkatan kualitas administrasi kredit, administrasi/ pembukuan, peningkatan efisiensi dan optimalisasi sarana pendukung operasional, pengamanan data nasabah baik kredit maupun dana, serta memastikan keamanan dari segi hukum atas operasional Bank.
5. Mengusahakan berlangsungnya pemeliharaan dan perawatan atas semua asset perusahaan secara baik.
6. Mengusahakan agar pelayanan kepada nasabah berlangsung secara baik

Rincian Tugas :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan administrasi dan pelayanan perbankan.
2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mengambil langkah- langkah preventif bagi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kegiatan operasional perbankan.
3. Memonitor dan mengevaluasi serta mengusahakan agar likuiditas keuangan tetap dalam posisi aman dan sehat.
4. Menjaga semua asset perusahaan, baik asset lancar maupun berupa asset aktiva tetap dalam keadaan aman.
5. Mengawasi pembuatan perhitungan pajak atas semua pajak yang dibebankan kepada perusahaan.



6. Mengamankan/menyimpan kunci utama khasanah.
7. Memantau tingkat pelayanan dan citra Bank ditengah masyarakat serta mencari solusi apabila terdapat masalah yang berkaitan terhadap hal itu.
8. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
9. Membuat laporan kerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
3. Pembaruan SOP - SOP dan aturan -aturan internal
4. Direksi melakukan kunjungan ke kantor cabang dan unit serta monitoring secara ketat dan konsisten untuk kredit yang masuk dalam pengawasan khusus dan penyelesaian kredit bermasalah.
5. Pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Direksi terus berupaya menaikkan Tabungan, Deposito dan OSC Kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati - hatian.
7. Direksi terus berusaha untuk menurunkan NPL dan menambah jumlah NOA serta meningkatkan mitigasi risiko kredit
8. Melakukan ujicoba/ simulasi perhitungan CKPN
9. Melakukan Lelang agunan pada kredit - kredit macet

Tidak ada

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Octavianus Sunyi Haryanto</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<b>Tanggung Jawab</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.</li><li>2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.</li><li>4. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li></ol>	
	<b>Rincian Tugas</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya perusahaan.</li><li>2. Memberikan nasehat, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.</li><li>3. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pelaksanaannya.</li><li>4. Mengawasi pekerjaan Direksi (meminta keterangan-keterangan).</li></ol>	



5. Menyetujui kebijakan penerapan Prinsip mengenal Nasabah (KYC).
6. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi BPR.
9. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM
10. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
11. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
12. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
13. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2.	Nama	Nicolous Ndaru Sunarwibowo
----	------	----------------------------

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

**Tanggung Jawab**

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.
4. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

**Rincian Tugas**

1. Melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya perusahaan.
2. Memberikan nasehat, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pelaksanaannya.
4. Mengawasi pekerjaan Direksi (meminta keterangan-keterangan).
5. Menyetujui kebijakan penerapan Prinsip mengenal Nasabah (KYC).
6. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi BPR.
9. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM
10. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
11. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
12. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
13. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

1. Perlu penyegaran SOP pengarsipan kepada karyawan, direksi perlu sidak ke cabang dan unit untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP - SOP
2. Laporan Publikasi Maret 2024 dikirimkan tepat waktu, jangan sampe terlambat



3. Jaminan atas nama orang lain dipakai dengan syarat dan ketentuan yang lebih berhati-hati
4. Pencapaian target Tabungan perlu evaluasi karena turun dibandingkan awal tahun, pencarian nasabah ditargetkan pada pensiunan dan masyarakat sekitar kantor kas
5. Deposan menyasar ke market Bank Umum dengan nominal yang tidak terlalu besar
6. Noa Deposito berkurang 38 rekening, diharapkan untuk bisa bertambah minimal sama dengan bulan sebelumnya
7. Kredit UMKM diharapkan tumbuh, kredit SME tumbuh sebagai tambahan saja
8. Mitigasi risiko di bisnis perlu untuk ditingkatkan
9. Pelaksanaan deviasi - deviasi pengajuan kredit disesuaikan dengan kewenangan
10. Penempatan ABA selalu diperhatikan tingkat risikonya dengan memantau kesehatan bank penempatan dan prosentase nominal yang ditempatkan
11. Usahakan NIM tidak tergerus, dengan strategi cost of fund yang diturunkan di sisi lain ditingkatkan pendapatan bunga kredit yang kecil - kecil
12. Kontrol dan monitoring supaya meningkatkan etos kerja/ produktifitas para karyawan
13. Selalu dipantau tahap - tahap penyelesaian kredit bermasalah dan juga penanganan oleh team NPL
14. Untuk selalu mengikuti ketentuan APU PPT
15. Lelang jaminan ketika harga mengakibatkan kerugian, tetap dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada

Tidak ada

#### 4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tidak ada

#### 5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak ada

#### 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Suitbertus Fajar Nugraha
	Persentase Kepemilikan (%)	7,82

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Nicolaus Ndaru Wibowo
	Persentase Kepemilikan (%)	8,68



Tidak ada

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Suitbertus Fajar Nugraha
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Johannes Bosco Herimahadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Laurentia Dyah Widia
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Octavianus Sunyi Haryanto
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Nicolous Ndaru Sunarwibowo
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00



Sebelumnya

### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak memiliki

## 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Shinta Bhakti Wedi
	Persentase Kepemilikan (%)	3,98

## 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Suitbertus Fajar Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
2.	Nama	Johannes Bosco Herimahadi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
3.	Nama	Laurentia Dyah Widia



Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Octavianus Sunyi Haryanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
2.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Rudy Handoko
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
2.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo



	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
3.	Nama	Wilibrodus Rahadiyan Dewanto, SH., Mkn
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
4.	Nama	Suitbertus Fajar Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
5.	Nama	Hery Wiratno P
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
6.	Nama	Naning Poedyaningsih
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris



	BPR	
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
7.	Nama	Antonius Subekti
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
8.	Nama	Mateus Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
9.	Nama	Bernadetta Ari Santi Handayani
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
10.	Nama	Christophorus Rinal Pudyantoro
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain



11.	Nama	Alex Sukono, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
12.	Nama	Ayuningtyas Parwati, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
13.	Nama	Wisynu Adhi Nuswandityo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
14.	Nama	Fransisca Romano Daruningsih
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
15.	Nama	C. Ste Aryati
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi



	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
16.	Nama	Petrus Santoso
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
17.	Nama	Budi Hardjanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
18.	Nama	B. Tatiek Suryanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
19.	Nama	Irene Wahyuningrum
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada hubungan keuangan dengan



	Pemegang Saham Lain di BPR	Pemegang Saham lain
20.	Nama	Paulus Arry Mardiyanto, MBA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain

### 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Suitberbus Fajar Nugraha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi lain
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
2.	Nama	Johannes Bosco Herimahadi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi lain
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
3.	Nama	Laurentia Dyah Widia
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi lain
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham



### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Octavianus Sunyi Haryanto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris lain
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
2.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris lain
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Kakak kandung Christophorus Rinal Pudyantoro

### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris lain
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Kakak kandung Christophorus Rinal Pudyantoro
2.	Nama	Hery Wiratno P
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Adik kandung Naning Poedyaningsih dan Paman Wisynu Adhi Nuswandityo
3.	Nama	Naning Poedyaningsih
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi



	Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ibu kandung Wisynu Adhi Nuswandityo dan Kakak kandung Hery Wiratno
4.	Nama	Mateus Nugraha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Adik kandung C. Ste Aryati dan Petrus Santoso
5.	Nama	Petrus Santoso
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Kakak kandung Mateus Nugraha dan Adik kandung C. Ste Aryati

## 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.290.840.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp426.000.000
1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp105.800.000



Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	<b>Rp35.500.000</b>

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	<b>Rp312.349.301</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp156.174.650</b>

### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp19.497.500</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp6.610.000</b>



### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp3.798.200</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	<b>Rp3.190.400</b>

### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
--	----------------



Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	4,93 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,30 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,22 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	2,05 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	3,46 : 1

## 13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	13 Februari 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
1. Perlu penyegaran SOP pengarsipan kepada karyawan, direksi perlu sidak ke cabang dan unit untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP - SOP		
2. Laporan Publikasi Maret 2024 dikirimkan tepat waktu, jangan sampe terlambat		
3. Jaminan atas nama orang lain dipakai dengan syarat dan ketentuan yang lebih berhati - hati		



	Tanggal Rapat	05 April 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencapaian target Tabungan perlu evaluasi karena turun dibandingkan awal tahun, pencarian nasabah ditargetkan pada pensiunan dan masyarakat sekitar kantor kas</li><li>2. Deposita menasar ke market Bank Umum dengan nominal yang tidak terlalu besar</li><li>3. Noa Deposito berkurang 38 rekening, diharapkan untuk bisa bertambah minimal sama dengan bulan sebelumnya</li><li>4. Kredit UMKM diharapkan tumbuh, kredit SME tumbuh sebagai tambahan saja</li><li>5. Struktur organisasi untuk memperbaiki pengawasan dan kontrol ADK kantor cabang, pengawasan dari pusat, perlu diperhatikan cek draft dari notaris untuk PK sebelum jadi PK</li><li>6. Mitigasi risiko di bisnis perlu untuk ditingkatkan</li></ol>	
3.	Tanggal Rapat	25 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan deviasi - deviasi pengajuan kredit disesuaikan dengan kewenangan</li><li>2. Penempatan ABA selalu diperhatikan tingkat risikonya dengan memantau kesehatan bank penempatan dan prosentase nominal yang ditempatkan</li><li>3. Usahakan NIM tidak tergerus, dengan strategi cost of fund yang diturunkan di sisi lain ditingkatkan pendapatan bunga kredit yang kecil - kecil</li><li>4. Kredit UMKM diharapkan tumbuh, sementara kredit SME tumbuh sebagai tambahan saja</li><li>5. Target - target karyawan dilihat progresnya secara bulanan, kekurangan pencapaian target menjadi beban target bulan berikutnya</li><li>6. Kontrol dan monitoring supaya meningkatkan etos kerja/ produktifitas para karyawan</li><li>7. Selalu dipantau tahap - tahap penyelesaian kredit bermasalah dan juga penanganan oleh team NPL</li><li>8. Untuk selalu mengikuti ketentuan APU PPT</li></ol>	
4.	Tanggal Rapat	10 September 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Efisiensi pencetakan Tabungan Arisan diperlukan dengan menghubungi vendor CBS (MSO) sudah ber bulan - bulan kerepotan pencetakannya</li><li>2. Cantumkan clausul perubahan bunga kredit sesuai dengan bunga yang berlaku di dalam PK, untuk PK lama diadendum dengan clausul tersebut</li><li>3. Tabris Macet perlu diselesaikan dalam waktu undian berikutnya</li><li>4. Evaluasi optimalisasi pemakaian mesin fotocopy</li><li>5. Usahakan NIM tidak tergerus, dengan strategi cost of fund yang diturunkan di sisi lain ditingkatkan pendapatan bunga kredit yang kecil - kecil</li><li>6. Uji coba perhitungan CKPN baik secara individual maupun kolektif</li></ol>	



7. Asuransi - asuransi JP segera mungkin diselesaikan nasabah - nasabah yang belum tercover asuransi penerus JP
8. Untuk selalu mengikuti ketentuan APU PPT
9. Selalu dipantau tahap - tahap penyelesaian kredit bermasalah dan juga penanganannya oleh team NPL

5.	Tanggal Rapat	13 Desember 2024
	Jumlah Peserta	2 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Upayakan peningkatan OSC UMKM lebih banyak daripada SME dengan memperbanyak network untuk marketing di bagian kredit
2. Lelang jaminan ketika harga mengakibatkan kerugian, tetap dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada
3. Simulasi CKPN diterapkan di RBB, sehingga ketika CKPN diberlakukan maka Bank Shinta Daya sudah siap
4. Secara organic OSC dan dana pihak ketiga di tahun 2025 harus meningkat, sementara pendapatan dari pengembalian PPAP segera dapat diselesaikan
5. Meningkatkan strategi bisnis dengan tetap pada prinsip kehati - hatian
6. Untuk Direktur YMF Kepatuhan harus lebih intensif melakukan kontrol dan monitoring terhadap seluruh kantor

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

##### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Octavianus Sunyi Haryanto
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

##### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Tidak Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>1 kasus</b>
---	----------------



Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	---------

### 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	1 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	---------

Terkait pengosongan agunan atas nama Edi Susanto masih menunggu putusan Pengadilan

### 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

### 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

#### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	03 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Parade Hadroh Bogem
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan kontribusi kegiatan parade Hadroh lintas Provinsi di Bogem Kalasan Sleman
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	10 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perbarindo
	Penjelasan Kegiatan	Baksos air bersih Perbarindo
	Jumlah (Rp)	Rp500.000



Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR SHINTA DAYA untuk tahun 2024.  
Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sleman, 07 April 2025

**PT BPR SHINTA DAYA**

Disiapkan oleh

Johan Iskandar

PE Kepatuhan & Manajemen Risiko

Disetujui oleh

Suitbertus Fajar Nugraha

Direktur Utama

Disetujui oleh

Octavianus Sunyi Haryanto

Komisaris Utama